



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI X DPR RI
(BIDANG: PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI,
PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, PEMUDA DAN OLAHRAGA,
DAN PERPUSTAKAAN NASIONAL)**

Tahun Sidang	:	2022 – 2023
Masa Sidang ke-	:	I (Satu)
Sifat Rapat	:	Terbuka
Jenis Rapat	:	Rapat Dengar Pendapat Umum
Dengan	:	1. Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) 2. Pengurus Pusat Ikatan Guru Indonesia (IGI) 3. DPP Forum Pengelola Lembaga Kursus Dan Pelatihan (DPP PLKP) 4. Poros Pelajar Nasional
Hari/Tanggal	:	5 September 2022.
Pukul	:	09.00 – Selesai.
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi X DPR RI
Pimpinan Rapat	:	Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, MPP., Wakil Ketua Komisi X DPR-RI.
Sekretaris Rapat	:	Dadang Prayitna, S.IP., M.H./Kabagset. Komisi X DPR RI.
Agenda acara	:	1. Penyampaian Aspirasi Terkait Rekomendasi Rapat Koordinasi Nasional PGRI Tanggal 29 Agustus 2022 Tentang RUU Sisdiknas. 2. Penyampaian Pandangan dan Usulan IGI Mengenai RUU Sisdiknas. 3. Berdiskusi Tentang RUU Sisdiknas serta Dukungan Penguatan Lembaga Kursus dan Pelatihan. 4. Penyampaian Aspirasi Poros Pelajar Nasional Mengenai RUU Sisdiknas.
Hadir Komisi X DPR RI	:	33 orang dari 53 orang anggota Komisi X DPR RI.
Hadir Narasumber	:	1. Drs. H.M. Ali H. Arahim, M.Pd. Sekjen PB PGRI. 2. Dudung Abdul Qodir, S.Pd., M.Pd. Wakil Sekjen PB PGRI 3. Dra. Rahmawaty, AR, M.Pd Ketua Departemen PB PGRI 4. Dr. Sumardiansyah P. Kusuma, M.Pd Ketua Dept. Penelitian dan Pengabdian Masyarakat PB PGRI

5. **Catur Nurrochman Oktavian, M.Pd** Wakil Bendahara PB PGRI
6. **Danang Hidayatullah**, Ketua Umum PP IGI
7. **Hibatun Wafiroh**, Sekjen PP IGI
8. **Jasmansyah**, Wakil Ketua Umum II PP IGI
9. **Akhmad Sururi Aziz**, Dewan Pembina PP IGI
10. **Iwan Ridwan**, Dewan Pembina IGI DKI Jakarta
11. **Zoelkifli M. Adam**, Ketua Umum DPP PLKP
12. **Arpinus Koto**, Wakil Ketua Umum DPP PLKP.
13. **Janis Hendratet**, Ketua Bidang Sertifikasi dan Kompetensi DPP PLKP
14. **Aji Samsul Rizal**, Ketua Departemen Sertifikasi DPP PLKP.
15. **Ulli Sigar Rusadi**, Dewan Penasehat DPP PLKP.
16. **Rafani Tuahuns**, Ketua Umum Pengurus Besar Pelajar Islam Indonesia.
17. **Afriyandi**, Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Pelajar Al-Washliyah.
18. **Imaduddin**, Ketua Umum Pengurus Pusat Serikat Pelajar Muslimin Indonesia.
19. **Rifky**, Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Pelajar Persis.
20. **Darda Sungkar**, Siswa SMK Walang Jaya Jakarta (Siswa STM).

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi X DPR-RI dibuka pada pukul 09.06 WIB oleh **Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, MPP./Wakil Ketua Komisi X DPR-RI**. setelah kuorum tercapai sebagaimana ditentukan dalam Pasal 281 ayat (1) dan Pasal 276 ayat (2) Peraturan DPR-RI Tentang Tata-Tertib dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Rapat diawali dengan pengantar Ketua Rapat, dilanjutkan perwakilan PB Persatuan Guru Republik Indonesia, PP Ikatan Guru Indonesia, DPP Forum Pengelola Lembaga Kursus dan Pelatihan, Poros Pelajar Nasional, dan menampung pertanyaan serta saran dari Anggota Komisi X DPR RI.

II. KEPUTUSAN/KESIMPULAN

1. Komisi X DPR RI menyampaikan apresiasi kepada PB Persatuan Guru Republik Indonesia, PP Ikatan Guru Indonesia, DPP Forum Pengelola Lembaga Kursus dan Pelatihan, Poros Pelajar Nasional, atas masukan dan aspirasi dengan beberapa poin utama sebagai berikut:
 - a. PB Persatuan Guru Republik Indonesia, menyampaikan antara lain bahwa:
 - 1) Persatuan Guru Republik Indonesia sebagai organisasi profesi guru wajib dilibatkan dalam berbagai kebijakan bidang pendidikan termasuk rencana revisi UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

- 2) RUU Sisdiknas perlu diperbaiki, mengingat ada substansi penting dalam bidang pendidikan yang sebelumnya diatur, diantaranya:
 - a) perlunya pengembalian pasal maupun ayat tentang tunjangan profesi guru/dosen, tunjangan khusus, maupun tunjangan kehormatan.
 - b) perlunya peningkatan kesejahteraan guru dan dosen sebagaimana amanat UU Tentang Guru dan Dosen.
 - 3) Mengusulkan pembentukan Tim Gabungan/Pokja Nasional Revisi UU Sisdiknas dari berbagai organisasi maupun kepakaran.
- b. PP Ikatan Guru Indonesia, menyampaikan beberapa masukan diantaranya:**
- 1) PP Ikatan Guru Indonesia siap mengawal RUU Sisdiknas untuk mewujudkan janji pemerintah dalam memajukan kesejahteraan dan kualitas guru.
 - 2) Terdapat beberapa hal yang perlu dievaluasi dari RUU Sisdiknas, diantaranya mengenai:
 - a) perlunya perbaikan definisi dan ketentuan mengenai:
 - tujuan pendidikan,
 - batasan usia wajib belajar,
 - definisi, syarat hak, kewajiban, tugas, dan karir guru/pendidik.
 - jenjang, jalur, dan jenis pendidikan.
 - organisasi profesi.
 - kurikulum.
 - b) pengaturan khusus mengenai tunjangan guru dan dosen sesuai UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen sepanjang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c) adanya jaminan peningkatan tunjangan guru yang mengikuti pengaturan dalam UU Tentang ASN untuk memastikan penerimaan penghasilan yang layak.
 - d) peningkatan bantuan operasional kepada satuan pendidikan swasta untuk membantu yayasan sebagai pemberi kerja maupun penghasilan yang layak kepada pendidik pada satuan pendidikan swasta.
 - e) kepastian perekrutan guru ASN setiap tahunnya mencukupi, dan tidak ada lagi guru honorer dalam satuan pendidikan negeri.
 - f) penjelasan bahwa pemisahan pengaturan antara sertifikasi dan penghasilan guru harus dilengkapi dengan beberapa pengaturan lain.
- c. DPP Forum Pengelola Lembaga Kursus dan Pelatihan, menyampaikan mengenai:**
- 1) Pemerintah perlu melibatkan penyelenggara Kursus dan Pelatihan yang tergabung dalam Forum Pengelola Lembaga Kursus dan Pelatihan (Forum PLKP) dalam RUU Sisdiknas.
 - 2) Perlunya perbaikan RUU Sisdiknas, diantaranya tentang:
 - a) perlu ada kajian komprehensif dan terukur atas hilangnya pasal tentang kursus dan pelatihan, dan pasal sertifikasi.

- b) prioritas atas pendidikan sepanjang hayat, khususnya dalam kursus dan pelatihan yang hadir dengan kelenturan, kecepatan, kemudahan beradaptasi.
- d. Poros Pelajar Nasional, menyampaikan adanya substansi RUU Sisdiknas yang perlu dievaluasi antara lain:
- 1) Tidak adanya klausul eksplisit yang menjamin adanya hak-hak pelajar/mahasiswa.
 - 2) Terdapat indikasi komersialisasi pendidikan yang ditunjukkan dari aturan mengenai pendanaan penyelenggaraan pendidikan.
 - 3) RUU Sisdiknas terindikasi menutup peluang masyarakat dalam evaluasi sistem pendidikan.
 - 4) Menolak RUU Sisdiknas masuk dalam Prolegnas Prioritas di DPR RI.
2. PB Persatuan Guru Republik Indonesia, PP Ikatan Guru Indonesia, DPP Forum Pengelola Lembaga Kursus dan Pelatihan, Poros Pelajar Nasional mendesak kepada pemerintah untuk **menunda** pengajuan RUU Sisdiknas sampai proses komunikasi dengan pemangku kepentingan pendidikan selesai dilakukan.
3. Komisi X DPR RI akan menindaklanjuti usulan PB Persatuan Guru Republik Indonesia, PP Ikatan Guru Indonesia, DPP Forum Pengelola Lembaga Kursus dan Pelatihan, Poros Pelajar Nasional, dengan beberapa catatan diantaranya:
- 1) Penyusunan RUU Sisdiknas harus melibatkan masyarakat secara luas sehingga dapat meningkatkan transparansi dan legitimasi regulasi yang dihasilkan.
 - 2) Komisi X DPR RI belum secara resmi menerima NA dan Draft RUU Sisdiknas, namun terbuka menerima seluruh masukan masyarakat jika mendapatkan amanah untuk membahas RUU Sisdiknas bersama Pemerintah.
4. Bahan masukan dan pandangan yang disampaikan PB Persatuan Guru Republik Indonesia, PP Ikatan Guru Indonesia, DPP Forum Pengelola Lembaga Kursus dan Pelatihan, Poros Pelajar Nasional menjadi bagian tidak terpisahkan dari RDPU ini, dan substansinya akan menjadi bahan rapat Komisi X DPR RI dengan Pemerintah untuk mengevaluasi RUU Sisdiknas yang telah disusun oleh Pemerintah.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 13.00 WIB.

Pimpinan Rapat



Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, MPP. *tl*